BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peralihan asset milik yayasan kepada pihak ketiga pada prinsipnya diperkenankan berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dilakukan oleh pengurus dengan persetujuan Pembina.
2. Akibat hukum jika terjadi penyalahgunaan aset Yayasan tanpa persetujuan Pembina maka akan berakibat adanya tanggung gugat dapat dilayangkan kepada organ yayasan, sebagai bentuk usaha untuk meminta pertanggung jawaban atas tindakan yang menyalahgunakan wewenang saat menjabat. Jika pengalihan harta kekayaan tersebut yang terjadi pada Yayasan Pendidikan Bima Nusantara dapat dinyatakan legal atau sah karena telah mendapatkan persetujuan dari Pembina selaku pimpinan tertinggi dalam organ Yayasan.

B. Saran

1. Pihak Yayasan Pendidikan Bina Nusantara Mandiri bisa memulai untuk melakukan perluasan bisnis mereka agar mampu memnutupi biaya operasional harian tanpa harus menjual asset yang dimiliki saat ini.

2. Pihak pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Pendidikan lebih ketat lagi dalam mengawasi dan mengontrol tata kelola yayasan.
3. Pihak masyarakat turut serta peran dalam upaya mengontrol jalannya pengelolaan yang dilaksanakan oleh organ-organ yayasan. Peran serta masyarakat ini bisa mewujudkan tata kelola yayasan yang berorientasi pada kemandirian, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan dan bertanggung jawab sehingga cita-cita yayasan dapat terwujud.